

MERAJUT MASA DEPAN SUMATERA SELATAN

Menuju Pembangunan Hijau yang Berketahanan Iklim



© World Agroforestry (ICRAF)



© World Agroforestry (ICRAF)

Pesan Kunci

- Sektor ekonomi berbasis lahan, khususnya pertanian, kehutanan dan perikanan, berkontribusi pada lebih dari seperlima perekonomian Sumatera Selatan. Namun ketersediaan lahan untuk ekstensifikasi di masa depan sangat terbatas. Diperkirakan pada tahun 2023, sisa lahan yang masih bisa digunakan untuk ekstensifikasi hanya sebesar 0.7 juta hektar. Arah pengembangan sektor berbasis lahan perlu difokuskan pada upaya peningkatan produktivitas dan nilai ekonomi per-unit lahan. Praktik pertanian yang baik dan agroforestri menjadi pilihan yang perlu dipertimbangkan.
- Dengan ekosistem gambut seluas 2,09 juta ha, Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam penanganan perubahan iklim. Jika tidak dikelola dengan baik, degradasi gambut dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca. Sebaliknya, gambut dapat menjadi aset mitigasi perubahan iklim yang berharga jika dilindungi dan dikelola dengan cara yang benar. Mencegah pembukaan lahan gambut dan memperhatikan tata air di ekosistem gambut merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan,
- Pertumbuhan jumlah penduduk Sumatera Selatan yang diperkirakan akan mendekati angka 10 juta jiwa di tahun 2035, mengharuskan perhatian khusus untuk ketahanan pangan.. Dengan jumlah lahan pertanian pangan yang terbatas, Sumatera Selatan perlu memikirkan berbagai strategi inovatif untuk memenuhi kebutuhan pangan. Beberapa diantaranya adalah mempertahankan lahan pangan yang ada, serta memanfaatkan pekarangan dan lahan terlantar untuk pertanian pangan.
- Kerentanan terhadap perubahan iklim akan dirasakan secara berbeda oleh perempuan dan laki-laki. Karenanya, pembangunan hijau yang berketahanan iklim perlu memastikan bahwa kesetaraan gender dalam pembangunan terpenuhi. Dibutuhkan pemberdayaan bagi perempuan, yang mencakup pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses dasar, dan sumber penghidupan, serta integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.

Sumatera Selatan di persimpangan jalan

Dalam dua dekade terakhir, pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan dampak positif berupa penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan pendapatan per kapita. Namun demikian, berbagai tantangan di masa depan,

terutama yang terkait dengan perubahan iklim membutuhkan strategi pembangunan baru yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi sambil meningkatkan ketahanan penghidupan masyarakat terhadap perubahan iklim. Di hadapan tantangan ini, momentum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) membawa Sumsel ke sebuah persimpangan jalan.

Di satu sisi, Sumatera Selatan memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Di sisi lain, Sumatera Selatan juga dihadapkan pada tantangan serius akibat perubahan iklim, yang dapat menghambat kemajuan dan membahayakan ketahanan masyarakat. Di sini Sumatera Selatan menghadapi dua pilihan. Pertama, melakukan “*business as usual*” yang diikuti dengan berbagai tantangan baru. Kedua, memperkuat implementasi paradigma pembangunan, dan bertransformasi ke pembangunan berkelanjutan secara lebih intensif. Pilihan kedua membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak, yang meliputi pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Terkait dengan itu, ada empat hal yang patut menjadi perhatian:

Pertama, Sumatera Selatan memiliki keterbatasan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, diiringi dengan keterbatasan lahan, menuntut tata guna lahan yang baik dan berkelanjutan. Dengan tata guna lahan yang baik, Sumatera Selatan dapat mengoptimalkan penggunaan lahan yang ada saat ini dan memutuskan secara bijak penggunaan lahan yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Tentunya dengan tetap menjaga integritas bentang lahan dan keberlangsungan fungsi lingkungan.

Kedua, Sumatera Selatan memiliki peran penting dalam upaya nasional untuk menangani perubahan iklim.

Sebagai provinsi dengan ekosistem gambut yang luas, Sumatera Selatan menyimpan potensi emisi gas rumah kaca yang besar. Namun, pengelolaan gambut yang baik dapat mengubahnya menjadi aset berharga dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Pemahaman terhadap penggunaan ekosistem gambut dalam perencanaan pembangunan, akan menentukan posisi Sumatera Selatan dalam penanganan perubahan iklim nasional.

Ketiga, pembangunan hijau tidak hanya berfokus pada kelestarian lingkungan dan penanganan perubahan iklim, tetapi juga pada ketahanan penghidupan masyarakat.

Sumatera Selatan perlu memastikan ketahanan pangannya, terutama dalam menghadapi perubahan iklim yang dapat mengganggu rantai pasokan makanan. Tantangan perubahan iklim di sektor pangan perlu diubah menjadi potensi pertumbuhan ekonomi melalui kemandirian pangan daerah yang bertumpu pada partisipasi seluruh elemen masyarakat

Keempat, kesetaraan dan keadilan gender menjadi faktor penting dalam mencapai pembangunan hijau yang berketahanan iklim. Dampak perubahan iklim akan dirasakan berbeda oleh laki-laki dan perempuan, dan partisipasi penuh dari semua pihak sangat penting untuk mengatasinya.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Sumatera Selatan, adalah momentum penting untuk mempertimbangkan strategi pembangunan masa depan yang tepat. Dokumen ini berisi rekomendasi kebijakan yang diharapkan dapat memandu para pemimpin daerah untuk memilih jalur pembangunan hijau yang berketahanan iklim. Usulan ini menawarkan solusi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim.

Sumatera Selatan memiliki peluang besar untuk menjadi pelopor pembangunan hijau di Indonesia. Dengan memilih jalur pembangunan yang berkelanjutan dan berketahanan iklim, Sumatera Selatan dapat memastikan masa depan yang lebih cerah bagi seluruh masyarakatnya.

Lahan terbatas, bagaimana memastikan pertumbuhan ekonomi berlanjut?

Sebagai provinsi dengan perekonomian yang sebagian bergantung pada sektor berbasis lahan, Sumatera Selatan perlu memperhatikan alokasi lahan saat ini dan ketersediaan lahan di masa yang akan datang. Kebutuhan akan lahan (*land-demand*) perlu diseimbangkan dengan ketersediaan lahan (*land-availability*) melalui penatagunaan dan perencanaan penggunaan lahan yang baik. Ketersediaan lahan untuk pembangunan senantiasa dipengaruhi oleh kesesuaian biofisik, kesesuaian sosio-ekonomi, dan kesesuaian alokasi/kebijakan. Kami menggunakan pendekatan pemodelan spasial untuk mengkaji luasan lahan Sumatera Selatan yang tersedia untuk perluasan/ekstensifikasi pertanian di masa yang akan datang berdasarkan alokasi penggunaan lahan pada RTRW dan jenis tutupan lahan saat ini. Aspek kesesuaian biofisik tidak dimasukkan dalam tulisan ini, namun tersedia dalam bentuk analisis detail bagi para pihak yang membutuhkan.

Dalam skenario “bisnis-seperti-biasa” (Gambar 1), luasan lahan yang masih dapat lakukan ekstensifikasi dalam dua dekade ke depan diperkirakan berada dalam rentang 0.4-0.7 juta hektar. Adapun luasan lahan yang bisa dipergunakan untuk ekstensifikasi namun dengan berbagai keterbatasan berjumlah 1.08 juta hektar (Tabel 1). Keterbatasan yang dimaksud berupa keharusan untuk memperhatikan parameter-parameter lingkungan sehingga dapat mencegah dampak negatif yang sulit dikendalikan. Salah satu bentuknya adalah keharusan memperhatikan tata air di ekosistem gambut. Di luar angka itu, lahan yang tersisa merupakan areal lindung, areal pemukiman terbangun atau areal pertanian lain yang sudah dimanfaatkan dan memiliki nilai ekonomi tinggi.

Tabel 1. Hasil analisis kluster pengembangan lahan tahun 2020 dan 2045 (BAU) berdasarkan tata ruang dan ekologi

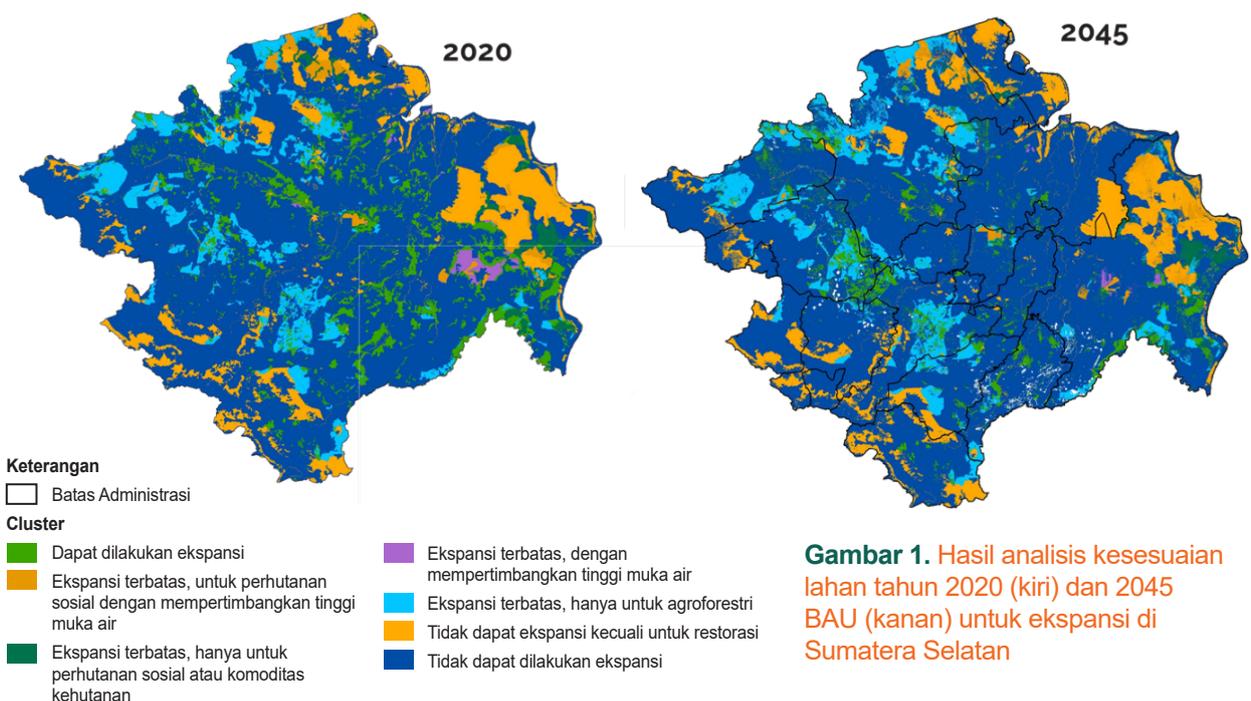
Klaster	Detail	Tutupan Lahan 2020		Tutupan Lahan 2045 (BAU)		Δ2045-2020
		Area (ha)	Persen	Area (ha)	Persen	
Bisa ekspansi (Go)	Bisa ekspansi (perkebunan, pertanian dan pemukiman)	702.965,13	8,10%	434.877,79	5,04%	
Ekspansi terbatas (Go-with restriction)	Hanya untuk Perhutanan Sosial dengan memperhatikan tinggi muka air	135.343,44	1,56%	127.938,36	1,48%	-268.087,34
	Hanya untuk komoditas hutan dan Perhutanan Sosial	182.848,01	2,11%	114.577,77	1,33%	-7.405,08
	Ekspansi memperhatikan tinggi muka air	61.077,93	0,70%	18.212,45	0,21%	-68.270,24
	Hanya untuk agroforestri	730.900,84	8,42%	824.225,50	9,55%	-42.865,48
Ekspansi bersyarat (No-Go unless)	Tidak bisa ekspansi kecuali untuk restorasi	995.759,91	11,48%	1.034.621,16	11,99%	93.324,66
Tidak dapat ekspansi (No-Go)	Tidak dapat ekspansi	5.868.276,66	67,63%	6.073.279,17	70,39%	38.861,25
Total		8.677.171,93	100%	8.627.732,20	100%	

Selain itu, hasil simulasi juga menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan dalam dua dekade ke depan perlu mengoptimalkan lahan-lahan terlantar melalui pemulihan dan restorasi.

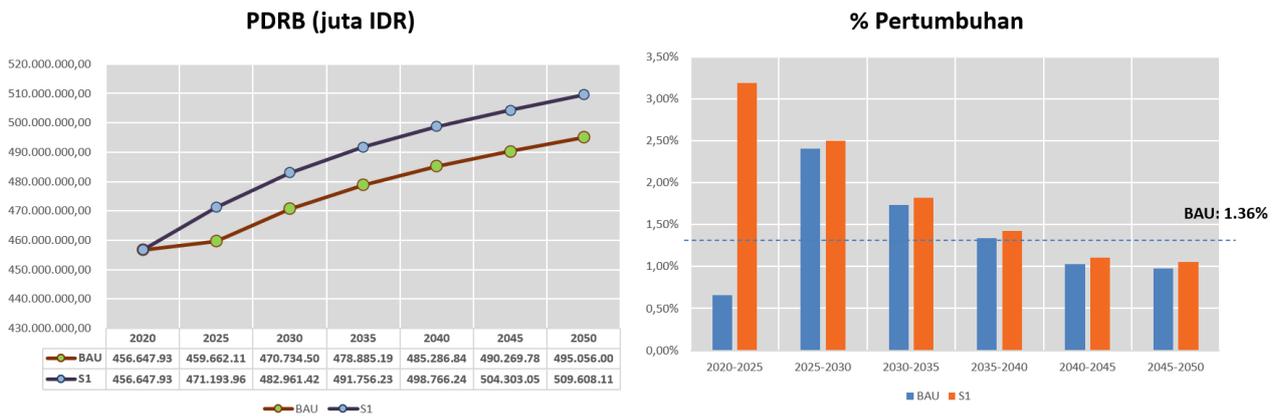
Jumlah lahan yang tersedia, tentunya tidak merata di semua kabupaten. Karenanya, arah penggunaan lahan di semua kabupaten/kota perlu mempertimbangkan area-area 'go with restriction' dan 'no-go' di setiap kabupaten/kota. Hal ini menjadi semakin krusial, terutama di kabupaten yang ditandai sebagai 'maju tertekan' dalam analisis Klassen, misalnya Muara Enim dan Banyuasin.

Dalam konteks ini, strategi yang perlu dipertimbangkan adalah memastikan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat terus tumbuh dengan menekankan pada produktivitas lahan. Perbaikan praktik usaha tani dan penerapan sistem agroforestri yang dapat meningkatkan nilai ekonomi per-hektar lahan, merupakan beberapa opsi yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan RPJPD.

Dengan keterbatasan yang ada, berdasarkan proyeksi, dalam kondisi "Bisnis Seperti Biasa/ Business as Usual (BAU)" pertumbuhan ekonomi



Gambar 1. Hasil analisis kesesuaian lahan tahun 2020 (kiri) dan 2045 BAU (kanan) untuk ekspansi di Sumatera Selatan



Gambar 2. Proyeksi PDRB pada sektor berbasis lahan 2020-2050 dengan skenario intervensi (S1)

dari sektor terbarukan berbasis lahan akan cenderung lebih lambat dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu (Gambar 2). Hal ini dikarenakan kemungkinan ekspansi yang terbatas, usia tanaman yang sudah tua, praktik usaha tani yang kurang baik dan rantai nilai yang belum tertata.

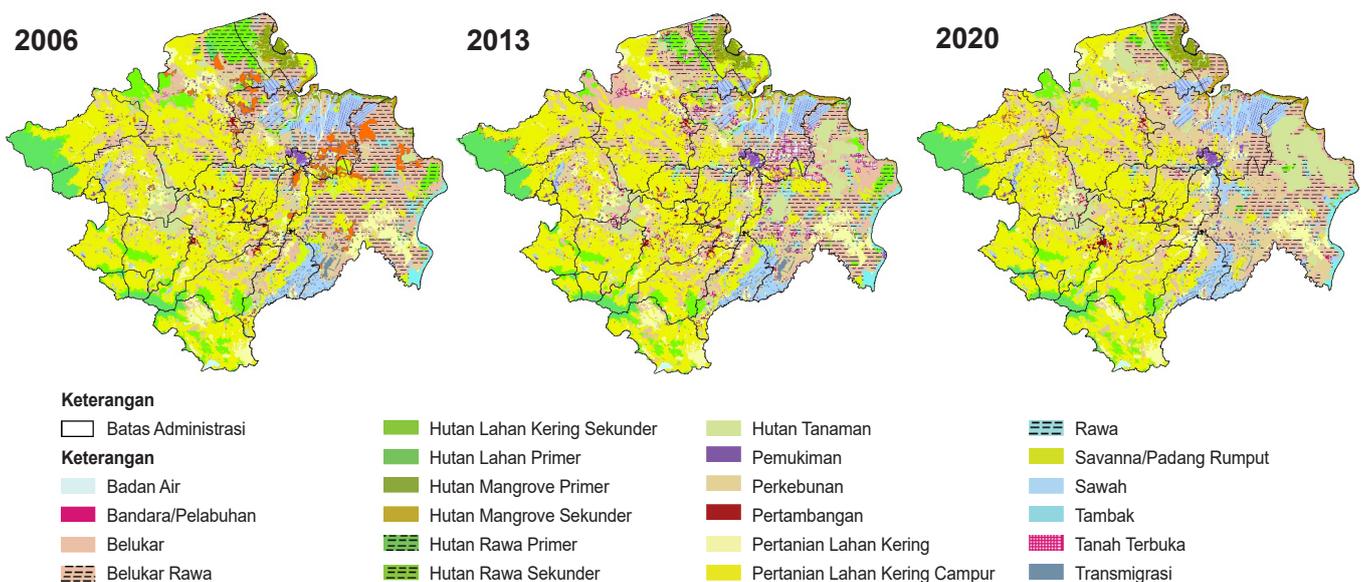
Dengan menekankan produktivitas (Skenario S1 pada Gambar 2, sektor terbarukan berbasis lahan mampu tumbuh lebih besar dan memberikan sumbangan yang lebih signifikan terhadap perekonomian daerah, walaupun dengan kebutuhan lahan yang sama dengan skenario BAU.

Ekosistem gambut yang rentan, jadi penyumbang emisi atau alat mitigasi?

Pada tahun 2022, Indonesia merilis laporan Enhanced NDC yang menargetkan penurunan emisi sebesar 31.8% (dan 43.2% dengan dukungan internasional. Indonesia akan memenuhi agenda

penurunan emisi dengan 97,2% target akan diraih melalui sektor lahan (AFOLU) dan energi. Dalam sektor AFOLU, Indonesia telah menetapkan target yang ambisius untuk merestorasi lahan gambut dan merehabilitasi lahan seluas 2 juta ha pada tahun 2030.

Tekanan pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan 15 tahun terakhir telah membawa berbagai dampak terhadap lingkungan dan bentang lahan (Gambar 3), salah satu yang terkena dampaknya adalah lahan gambut. Saat ini ekosistem gambut Sumatera Selatan sebagian besar berada dalam keadaan rusak dan terdegradasi. Hal ini patut menjadi perhatian, mengingat gambut memiliki dua fungsi yaitu fungsi budidaya serta fungsi ekosistem gambut (FEG) yang sejatinya melindungi masyarakat dari berbagai bencana. Dalam kondisi ini, Sumatera Selatan dapat turut menurunkan emisi gas rumah kaca dalam upaya nasional dan global menghadapi perubahan iklim, atau malah menyumbang emisi akibat kebakaran, dan kerusakan lahan gambutnya.



Gambar 3. Luasan Perubahan Lahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006, 2013, dan 2020 (Sumber: Peta KLHK)

Pemanfaatan lahan gambut yang tidak tepat dapat merusak fungsi dan peranan ekosistem gambut. Dampaknya, dapat lebih sering terjadi bencana yang merugikan pembangunan seperti kekeringan dan banjir yang berujung pada meningkatnya biaya hidup masyarakat serta berbagai masalah lingkungan. Selain itu, kerusakan lahan gambut dapat meningkatkan hilangnya habitat bagi spesies-spesies asli yang tinggal di sekitar lahan gambut. Kerusakan lahan gambut juga salah satu penyumbang kenaikan emisi karbon di Sumatera Selatan.

Pengelolaan gambut di Provinsi Sumatera Selatan menjadi prioritas karena kondisinya yang semakin lama semakin menurun. Perkembangan lahan gambut dari tahun 1990 hingga 2017 terlihat mengalami alih fungsi yang cukup masif untuk berbagai kegiatan. Sekitar 1.298.154 hektar lahan mengalami deforestasi dengan 932.204 hektar berada di lahan gambut. Kebakaran lahan gambut pada tahun 2015 berkontribusi pada degradasi lahan gambut dan memberikan kerugian bagi kehidupan masyarakat. Kebakaran lahan gambut yang cukup besar terulang kembali pada tahun 2019.

Berdasarkan peta KLHK untuk status kerusakan gambut skala 1:250.000, ekosistem gambut Sumatera Selatan paling banyak masuk klasifikasi rusak ringan. Namun pada kategori rusak berat, banyak terdapat di area Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) Lindung. Hal ini dapat berdampak pada terganggunya kualitas dan kuantitas air dan meningkatnya risiko kebakaran.

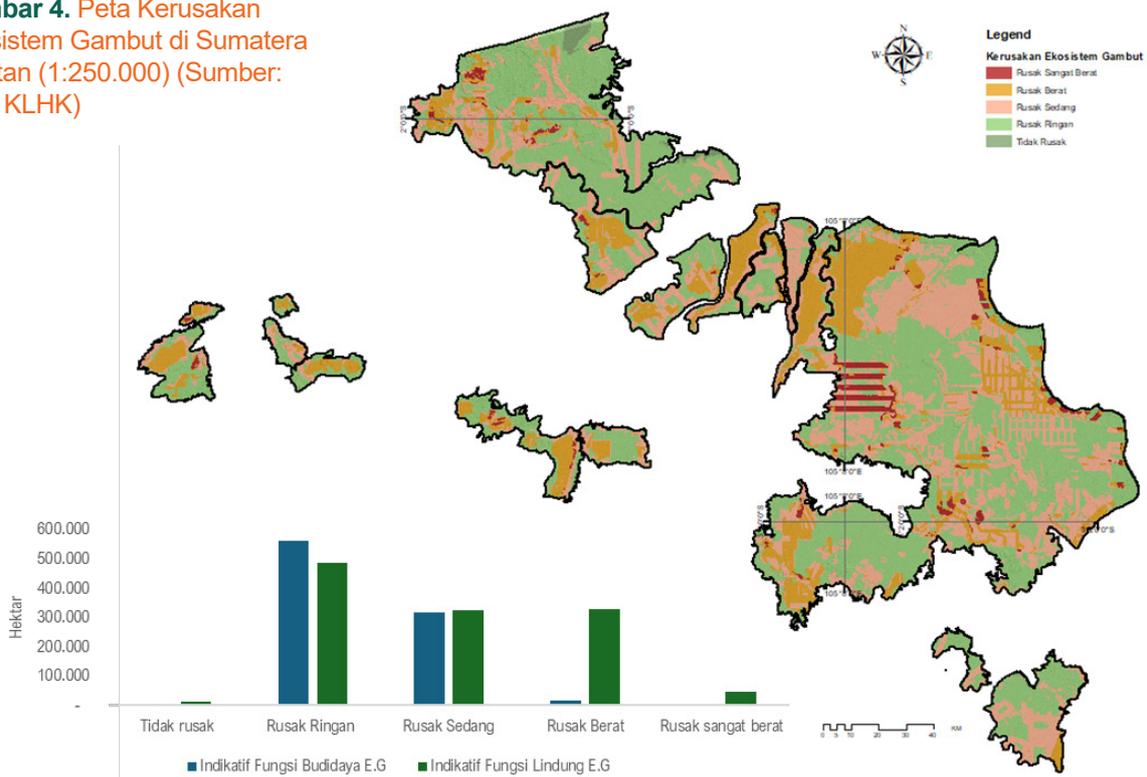
Lahan gambut berperan penting dalam penyerapan karbon. Secara global, meskipun hanya mencakup 0,4 persen daratan dunia, lahan gambut yang terdegradasi mengeluarkan lebih dari lima persen emisi karbon antropogenik global¹. Oleh karena itu, kejadian kebakaran pada lahan gambut menyumbang lebih banyak emisi karbon ke atmosfer.

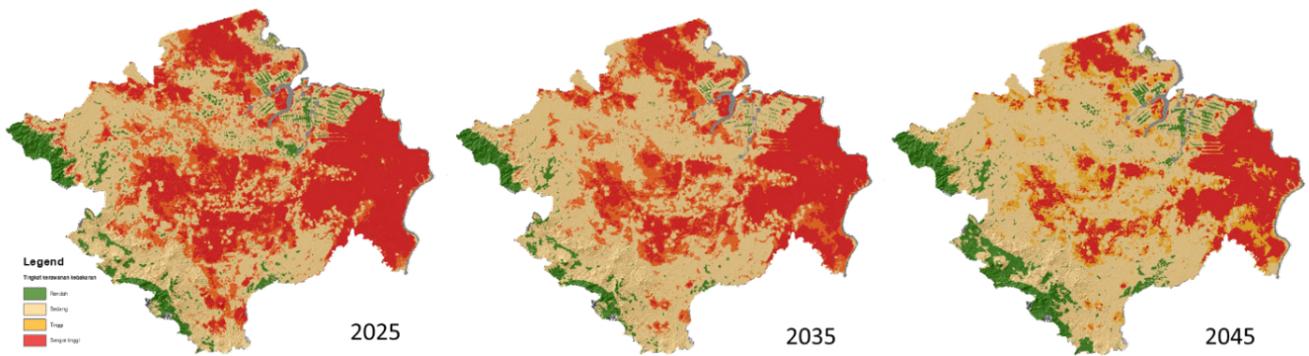
Berdasarkan data historis dan analisis proyeksi, emisi lahan gambut selalu bernilai lebih tinggi dibandingkan dengan emisi lahan mineral. Hal ini diakibatkan oleh potensi emisi lahan gambut yang bukan hanya berasal dari adanya alih fungsi tutupan lahan, namun juga berasal dari emisi yang dihasilkan dari dekomposisi akibat kegiatan pengelolaan gambut itu sendiri. Kondisi tergenang pada lahan gambut membuat proses dekomposisi tidak berjalan sehingga membuat lahan gambut menjadi penyimpan cadangan karbon terbesar.

Perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dilakukan dengan pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada ekosistem gambut. Dalam skenario yang disusun pada dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG), upaya perlindungan kelas tutupan hutan ditingkatkan untuk mempertahankan fungsi ekosistem hutan, sehingga alokasi lahan untuk aktivitas perekonomian yang dapat memicu degradasi ekosistem gambut dapat dikurangi.

1 Van Offelen, J. (2019). New IPCC Special Report highlights importance of peatlands for climate change mitigation. August 15. <https://globalpeatlands.org/>.

Gambar 4. Peta Kerusakan Ekosistem Gambut di Sumatera Selatan (1:250.000) (Sumber: Peta KLHK)





Gambar 5. Proyeksi kerawanan kebakaran lahan BAU

Bagaimana cara meningkatkan ketahanan pangan?

Ketahanan pangan merupakan salah satu isu prioritas pembangunan di Sumatera Selatan, sebagai bagian dari komitmen Indonesia untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Salah satu cara untuk mengukur ketahanan pangan adalah dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang disusun dari sembilan indikator berdasar tiga aspek ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan.

Meskipun pada level provinsi IKP Sumatera Selatan berada pada level tahan, namun jika dilihat pada level kabupaten/kota masih terdapat kesenjangan pada ketiga aspek. Kesenjangan ini diakibatkan masih tingginya tingkat kemiskinan, minimnya akses air bersih dan masih tingginya angka tengkes (*stunting*).

Ketahanan pangan terkait dengan produksi pangan lokal dan inflasi. Salah satu bahan pangan yang memengaruhi inflasi di Sumatera Selatan adalah beras. Produksi padi di Sumatera Selatan mengalami fluktuasi dan cenderung menurun (BPS, 2023). Perubahan iklim turut memberi tekanan pada sektor pertanian dalam bentuk peningkatan suhu udara dan perubahan intensitas serta pola curah hujan yang memengaruhi periode musim. Musim kemarau menjadi lebih panjang dan musim hujan menjadi lebih pendek, atau sebaliknya. Kondisi dapat berdampak pada ketersediaan air, dan ujung-ujungnya produksi tanaman: menaikkan potensi gagal tanam dan gagal panen. Peningkatan konversi lahan menjadi lahan pertanian (sawah) tidak diiringi dengan peningkatan produksi, sementara jumlah lahan yang dapat diekspansi di Sumatera Selatan semakin terbatas (Tabel 1). Oleh karena itu optimalisasi lahan perlu didorong guna memaksimalkan hasil produksi dan meminimalkan konversi lahan.

Program kebun dapur dan pemanfaatan lahan terlantar untuk tanaman pangan memiliki potensi besar untuk meningkatkan ketahanan pangan

Indeks Ketahanan Pangan



Gambar 6. Indeks Ketahanan Pangan di Pulau Sumatera tahun 2023 (Sumber: Badan Pangan Nasional)

Sumatera Selatan dalam dua dekade ke depan. Program ini akan mendorong kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangannya sendiri, sekaligus meningkatkan ketahanan pangan daerah. Program ini memanfaatkan sumber daya lokal yang sudah ada, yaitu pekarangan rumah dan lahan terlantar. Hal ini akan meminimalisir biaya produksi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan. Selain itu, program ini mudah diimplementasikan dan tidak memerlukan teknologi tinggi. Masyarakat dapat dengan mudah menanam tanaman pangan di pekarangan rumah atau lahan terlantar dengan menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki. Jika dilakukan, intervensi ini memiliki dampak ekonomi yang positif. Dengan memproduksi sendiri kebutuhan pangannya, masyarakat dapat menghemat pengeluaran dan meningkatkan pendapatan mereka. Selain itu intervensi ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ketahanan pangan. Dengan terlibat dalam program ini, masyarakat akan lebih memahami pentingnya memiliki akses yang berkelanjutan terhadap pangan yang aman dan bergizi.



Gambar 7. Pemanfaatan Lahan Pekarangan untuk Tanaman Pangan

Mengapa perempuan berperan penting dalam pembangunan?

Pembangunan memang membawa banyak manfaat, tetapi juga memiliki berbagai tantangan dan ancaman seperti perubahan iklim, kebakaran hutan, dan krisis ekonomi. Dampak negatif dari pembangunan ini tidak dirasakan secara sama rata oleh semua orang. Kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan, anak perempuan, dan kelompok rentan lainnya, lebih mudah terkena dampak buruknya. Hal ini terjadi karena mereka memiliki akses yang terbatas terhadap manfaat, kontrol, dan partisipasi dalam pembangunan.

Diskusi kelompok terpumpun (FGD) yang diselenggarakan oleh DP3A Provinsi Sumatera Selatan bersama ICRAF Indonesia menemukan bahwa beberapa isu kerentanan yang terjadi akibat perubahan iklim ternyata dilatarbelakangi oleh dan semakin berdampak pada adanya ketimpangan

gender, khususnya yang dialami oleh kelompok perempuan dan anak-anak. Dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan tangguh di Sumatera Selatan, maka penyelesaian kerentanan dampak perubahan iklim perlu responsif terhadap berbagai faktor kesenjangan gender tersebut.

Perempuan berperan penting dalam pembangunan di berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Melibatkan perempuan dalam pembangunan amatlah penting untuk mencapai kesetaraan gender, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup.

Berbagai capaian pembangunan di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa Sumatera Selatan telah mencapai kemajuan dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif. Capaian ini ditandai dengan meningkatnya capaian pembangunan makro berbasis gender/data terpilah, seperti Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender.

Capaian IPG dan IDG di Sumatera Selatan pada kurun waktu 5 tahun terakhir bahkan termasuk yang paling tinggi di Pulau Sumatera. Membaiknya ketimpangan gender di Sumatera Selatan yang ditandai dengan menurunnya capaian indeks ketimpangan gender, meski masih di atas rata-rata Nasional, juga mengindikasikan bahwa peranan perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik di Provinsi Sumatera cenderung terus meningkat dan semakin menuju pembangunan yang setara.

Dengan progres tersebut, Sumatera Selatan memiliki potensi untuk terus meningkatkan pelibatan dan pemberdayaan perempuan agar keluar dari kerentanan akibat berbagai tantangan pembangunan, termasuk dampak perubahan iklim. Pelibatan aktif perempuan dalam pembangunan

Tabel 2. Faktor Kesenjangan Gender pada Isu Kerentanan Perubahan Iklim Hasil FGD di Sumatera Selatan

No.	Kerentanan	Dampak	Faktor Kesenjangan
1	Kerawanan pangan dan kelangkaan bahan pangan	Meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita untuk konsumsi makanan	<ul style="list-style-type: none"> ● Akses pengetahuan yang terbatas pada perempuan, mencakup pengetahuan tentang penggunaan alat pengolahan pangan dan pengetahuan tentang budidaya sayuran; ● Anggota KWT kurang berani berpendapat dalam forum musyawarah tingkat desa; ● Pengambilan keputusan dalam forum desa masih didominasi laki-laki; ● Manfaat program hanya sesaat dan tidak berlanjut.
2	Kemarau panjang dan banjir	Adanya beberapa daerah yang lebih rawan banjir dan kekeringan, namun intervensinya belum responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengambilan keputusan dalam forum desa masih didominasi laki-laki; ● Partisipasi perempuan dalam perencanaan pengendalian dan penanggulangan banjir dan kekeringan relatif rendah; ● Penganggaran belum dilakukan dengan mempertimbangkan perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki. Belum semua kegiatan dan program terkait kebencanaan memiliki GAP dan GBS.
3	Kebakaran hutan dan lahan	Anak-anak terdampak paling parah terhadap kejadian karhutla, terutama akibat ISPA	<ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi karhutla diprioritaskan untuk laki-laki kecuali di desa-desa yang penduduknya lebih banyak perempuan; ● Satgas linmas dan anggota MPA sekitar 90% laki-laki sehingga keputusan didominasi oleh laki-laki. Perempuan jarang terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, biasanya terlibat di urusan logistik dan konsumsi.

memerlukan peningkatan akses perempuan pada sumber penghidupan yang layak, seperti meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan dan meningkatkan partisipasi yang berarti dalam proses pengambilan keputusan, agar dapat berkontribusi secara lebih optimal dalam ekonomi keluarga dan mewujudkan intervensi terhadap permasalahan daerah yang lebih responsif gender.

Rekomendasi untuk Arah Kebijakan RPJPD Sumatera Selatan

1 Penatagunaan dan pengelolaan lahan berkelanjutan

Beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan sebagai strategi untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dari sektor terbarukan berbasis lahan di Sumatera Selatan dalam 20 tahun yang akan datang, antara lain: perbaikan produktivitas komoditas strategis, diversifikasi produk, peningkatan nilai tambah, perbaikan rantai nilai, serta optimalisasi dan restorasi lahan terlantar.

2 Penanganan kebakaran lahan

Berbagai upaya komprehensif perlu dilakukan untuk memastikan strategi mitigasi atau pencegahan melalui penataan ruang, pemantauan, peningkatan kesadaran masyarakat, dan penegakan hukum. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat dalam upaya berkelanjutan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan.

3 Peningkatan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut

Strategi untuk memastikan kelestarian ekosistem gambut adalah dengan mengintegrasikan upaya pemanfaatan, pengendalian, dan pemeliharaan dengan inventarisasi penurunan emisi dari ekosistem gambut yang dipantau secara berkala.

4 Peningkatan produktivitas pertanian dengan optimalisasi pemanfaatan lahan, dan peningkatan nilai tambah produksi dan hilirasi yang berbasis komoditas unggulan

Strategi dalam upaya meningkatkan ketahanan pangan perlu dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi dan meminimalkan konversi lahan. Salah satu strategi yang dapat dilakukan ialah optimalisasi lahan pertanian yang sudah tersedia saat ini melalui praktik budidaya pertanian yang baik (*good agricultural practices*) dan agroforestri. Upaya peningkatan nilai tambah dan hilirasi dapat menjadi fokus pembangunan sehingga mendukung upaya intensifikasi yang dilakukan, melalui kegiatan yang tidak membutuhkan kegiatan perluasan lahan akan tetapi sangat signifikan meningkatkan ekonomi wilayah dan kesejahteraan masyarakat.

5 Pelibatan dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan

Diperlukan strategi untuk meningkatkan akses perempuan pada modal penghidupan yang lebih layak dan berkualitas termasuk pendidikan, kesempatan kerja, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan secara aktif. Banyak perempuan yang saat ini bekerja pada sektor informal perlu ditingkatkan keterampilannya agar dapat tangguh terhadap berbagai tantangan, seperti krisis pangan dan bencana akibat perubahan iklim, serta mampu berkontribusi secara optimal pada ekonomi keluarga maupun ekonomi daerah. Mereka juga memerlukan perlindungan kerja supaya dapat keluar dari situasi rentan.

Benita T, Pandiwijaya A, Lestari SF, Sari IR, Johana F, Ekadinata A, Anugerah P, Yuliadi A, Susanto A. 2024. *Merajut Masa Depan Sumatera Selatan: Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang Berketahanan Iklim*. Bogor, Indonesia: CIFOR-ICRAF Program Indonesia.

Untuk informasi dan komunikasi silahkan menghubungi: Andree Ekadinata (a.ekadinata@cifor-icraf.org) dan Pijar Anugerah (p.anugerah@cifor-icraf.org)

Lembar Informasi #LahanUntukKehidupan menyajikan berbagai informasi dari kegiatan-kegiatan Program Land4Lives. Edisi ini disusun melalui diskusi dan konsultasi dalam berbagai wawancara, pertemuan teknis, dan lokakarya dengan para pemangku kepentingan, di bawah koordinasi dan kepemimpinan Bappeda Provinsi Sumatera Selatan. Pemangku kepentingan yang terlibat meliputi OPD, Perguruan Tinggi, NGO/CSO, dan unsur lain.



In partnership with
Canada



www.lahanuntukkehidupan.id